



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 866/VI/2015

11/JUNI 2015



FIFA



DPR Akan Gunakan Hak Interpelasi Soal PSSI

DPR Akan Gunakan Hak Interpelasi Soal PSSI



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah didampingi Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya menerima Perwakilan Exco PSSI, dan DPRD Papua

Permasalahan masa depan persepakbolaan seperti diujung tanduk. Mengingat, sanksi FIFA sudah dijatuhkan pada hari Jumat (29/05). DPR pun memberi perhatian khusus kepada permasalahan ini. Bahkan, DPR akan menggunakan hak interpelasi terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi menyusul keputusannya membekukan PSSI.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Fahri Hamzah saat melakukan pertemuan dengan Perwakilan Exco PSSI, Anggota DPRD Papua dan Persipura Mania Jayapura. Dalam kesempatan ini, Fahri didampingi oleh Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya.

“Karena luasnya permasalahan, maka konsekuensinya DPR harus ajukan penggunaan hak lebih besar, yaitu untuk menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi pada Keputusan Menpora ini,” tegas Fahri di ruang rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Jumat (29/05).

Politisi F-PKS itu menambahkan, kebijakan Menpora mengakibatkan dampak yang besar terhadap persepakbolaan Indonesia. Fahri menegaskan, Menpora harus segera mencabut surat keputusannya, karena tak berlaku secara hukum setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan penundaan surat pembekuan PSSI tersebut.

“Secara legislatif dan yudikatif tak ada yang setuju dan mengakui surat itu. Kan, tidak mudah membubarkan lembaga, harus ke pengadilan. Nah pelanggaran-pelanggaran ini sangat mungkin untuk jadi pintu masuk investigasi lanjutan, apalagi Presiden terlibat dalam masalah ini,” tutur Politisi asal Dapil NTB ini.

Fahri juga menantang Menpora untuk melaporkan jika ada mafia di tubuh PSSI, seperti kasus yang menimpa FIFA. Fahri menyatakan, jika ada mafia di tubuh PSSI, yang ditangkap pelakunya, bukan membekukan lembaganya.

“Kami tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Menpora. Misalkan ada mafia, tunjuk, dan langsung polisikan

seperti di FIFA, bukan lembaganya dibubarkan,” kesal Fahri, yang dalam kesempatan itu mengenakan jersey Persija.

Senada dengan Fahri, Riefky menegaskan pihaknya mengancam akan menggulirkan interpelasi jika Presiden Joko Widodo tak segera memerintahkan Menpora mencabut surat kepu-

tusan pembekuan PSSI. Jika SK tak segera dicabut, induk sepak bola dunia FIFA pun membekukan sepak bola Indonesia.

“Tentu kami tak bisa diam, bisa berkembang langkah politiknya. Kalau tak puas, kami pakai hak interpelasi. Kerugian tak hanya kepada pemain, tapi juga nama Indonesia,”

kesalnya.

Politisi F-PD ini menegaskan, pihaknya sudah 2 kali mengundang Menpora untuk melakukan rapat kerja, namun Menpora mengaku masih sibuk dengan persiapan Sea Games. Akhirnya ia melaporkan hal ini kepada Pimpinan DPR, Rabu lalu. (sf) foto: *denus/parle/hr*

Fadli: Ini Sejarah Buram Sepak Bola Indonesia

Sanksi FIFA sudah dijatuhkan bagi PSSI. Indonesia tak boleh mengikuti perhelatan sepak bola internasional. Semua kalangan menyayangkan sanksi ini. Bahkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ikut bersuara bahwa Indonesia memasuki sejarah buram sepak bolanya.

“Saya kira ini patut disayangkan. Sejarah sepak bola Indonesia menjadi sangat buram, karena *suspend* ini sangat berpengaruh kepada pengembangan olah raga nasional. Saya kira kita berada pada satu masa kemunduran. Jadi, seharusnya pemerintah bisa melakukan satu proses *recovering* dalam waktu dekat dan melakukan evaluasi bahwa tindakannya salah,” tandas Fadli usai perayaan ulang tahunnya yang ke-44 tahun di ruang kerjanya, Senin (1/6).

Dampak sanksi FIFA tersebut, lanjut Fadli, merambah ke klub-klub sepak bola di Tanah Air. Peminat sepak bola Indonesia juga semakin kecewa, karena tak ada lagi kompetisi yang digelar oleh PSSI. Sanksi ini dikeluarkan bersamaan dengan merosotnya ekonomi nasional. Pihaknya menyayangkan PSSI diperlakukan seperti ini, tidak saja oleh FIFA tapi juga oleh pemerintah.

“Saya kira ini satu kemunduran total. Pemerintah harus memperbaiki kebijakannya terhadap PSSI. Jangan sampai



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

memandang PSSI dengan kaca mata *like and dislike*. Jangan karena tidak suka pada figurnya, kemudian PSSI sebagai institusi dikorbankan. Harus dipisahkan antara institusi dengan pengurus. Saya kira kesalahan dalam pendekatan kebijakan pemerintah,” ungkap Fadli lagi. (mh) foto: *andri/parle/hr*

Terkait PSSI, Pemerintah Perlu Respon Interpelasi



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan pemerintah harus mempunyai komitmen jangka pendek untuk memenuhi tuntutan federasi sepak bola dunia atau FIFA agar PSSI dapat berfungsi untuk memulihkan organisasi. DPR akan meminta penjelasan melalui penggunaan hak interpelasi.

“Pemerintah juga harus menjelaskan secara resmi apa yang terjadi kepada publik, dan penjelasan ini harus melalui penggunaan hak interpelasi DPR,” kata Fahri berdasarkan *press realese* yang diterima redaksi Parlemen.

Pemerintah menurut Fahri, seperti yang sering dikatakan, memiliki rencana besar untuk PSSI dan persepakbolaan Indonesia, “Maka inilah saat yang tepat untuk menjelaskannya,” tegas Fahri.

Sejak awal, jelas Fahri, semua orang paham bahwa FIFA adalah lembaga yang serius, sebagai federasi sepak bola

dunia yang telah berumur lebih dari 111 tahun, maka FIFA pasti memiliki mekanisme yang baku, “Dan intervensi adalah momok dalam *statuta* FIFA,” ujarnya.

Sementara itu, tambahnya, sejak awal publik tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah melalui Kemenpora. “Keinginan untuk memperbaiki PSSI dan sepak bola Indonesia tidak tercermin dalam sikap Menpora,

bahkan lebih nampak tidak mengerti persoalan sampai akhirnya PSSI dibekukan,” terang Fahri yang juga politikus dari PKS ini.

Menurut Fahri, maka tidak ada cara lain bahwa masalah ini harus di-investigasi secara menyeluruh. “Sebab kita tidak boleh membiarkan anomali terus melanda persepakbolaan kita,” tegasnya. (nt) foto: *denus/parle/hr*

Fadli Zon Raih Muri di Hari Ultah

Batu cincin seberat 70 kg milik Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dianugerahi penghargaan MURI oleh Jaya Suprana. Bahkan, batu cincin tersebut menurut Suprana diperkirakan menjadi batu cincin terbesar di dunia.

Penganugerahan MURI tersebut diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun Fadli yang ke-44 tahun di ruang kerjanya, Senin (1/6). Fadli menjelaskan, batu akik berjenis pancawarna tersebut didapatkan dari Garut. Ring cincinya terbuat dari campuran *stainless* dan tembaga. Di tengah demam batu akik di Nusantara, Fadli justru membuat terobosan unik dan menakjubkan dengan mendesain cincin raksasa.

“Saya berterima kasih sudah dibuatkan acara kecil sekaligus ada rekor MURI untuk batu cincin akik yang diserahkan langsung oleh Pak Jaya Suprana. Ini bertepatan dengan ulang tahun saya yang ke-44 tahun. Saya kira batu akik ini, merupakan salah satu kesenangan dari rakyat Indonesia dan ini fenomenal di seluruh daerah. Ini juga menghibur kita di tengah sanksi FIFA untuk PSSI,” terang Fadli.

Menurut Fadli, Indonesia memiliki beragam jenis batu yang khas dan menarik. Hampir di setiap daerah memiliki kekhasannya tersendiri. Seperti batu *green sojol* yang ia dapatkan dari Palu, Sulawesi Tengah. Batu tersebut seperti memiliki kekuatan magis. Fadli membuktikan sendiri kepada para undangan yang hadir, dengan mencuci tangan di air yang direndam batu *green sojol*, empat orang secara menakjubkan bisa mengangkat tubuh Fadli hanya dengan jari telunjuk dan tengah yang disatukan.

Fadli mengaku, sejak ada demam batu akik, ia akhirnya



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima penghargaan MURI

mengikuti tren dengan mengoleksi batu cincin. Sudah lebih dari seratus batu cincin yang berhasil ia koleksi. “Batu akik sudah menjadi *heritage* bagi Indonesia,” ungkap Fadli. Hadir dalam acara ultah tersebut, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Kapolda Jawa Barat, Kapolres Bogor, dan Hasyim Joyohadikusumo. Hadir pula ibunda, isteri, dan putri sulung Fadli. (mh) foto: *andri/parle/hr*

Delegasi DPR Kunjungi Parlemen Sudan

Dalam rangka memenuhi undangan dari Parlemen Sudan, Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, berkesempatan mengunjungi Parlemen Sudan guna menghadiri pelantikan anggota parlemen baru pada 1 Juni 2015.

Rombongan delegasi DPR RI diikuti pula oleh Wakil Ketua BKSAP Rofi' Munawar dan anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun.

Sebelumnya, berdasarkan *Press Realese*, di Sudan, Minggu (31/5), delegasi melakukan pertemuan pendahuluan dengan Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Sudan, Mohamed Youssef Abdalla.

Dalam pertemuan tersebut, Mohamed Youssef menjelaskan tentang mekanisme pemilihan ketua Parlemen Sudan, “Ketua Parlemen dipilih setelah pelantikan, lalu seminggu

kemudian diteruskan dengan pemilihan ketua-ketua Komisi,” jelas Mohamed.

Selanjutnya, dalam kesempatan ini, Mohamed menjelaskan, tentang keinginan Parlemen Sudan untuk menjadi Sekretariat Parlemen Asia Afrika yang pertama, “Keinginan ini merupakan tindak lanjut dari peringatan Kongres Asia Afrika (KAA) di Bandung, bulan April lalu, dimana Parlemen Sudan menyambut baik MoU kerja sama dengan DPR RI, dan tindak lanjut kesepakatan tersebut setelah pelantikan Parlemen baru,” terang Mohamed.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan kehadirannya ke Sudan adalah yang ketiga kalinya.

“Setiap kali datang ke Sudan, saya selalu merasa hadir di negeri sendiri, karena adanya hubungan khusus antara



Indonesia dan Sudan, terlebih lagi dalam UU MD3, mewajibkan setiap anggota DPR untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen, terutama parlemen di Negara-negara Islam” kata Fahri.

Mengenai Sekretariat Parlemen Asia Afrika yang pertama, tambah Fahri, pihaknya menyambut baik dan mendukung keinginan Parlemen Sudan tersebut.

Di hadapan Mohamed Youssef, Fahri berharap, demi meningkatkan kerja sama antara parlemen Indonesia dan Sudan, maka perlu dilakukan institusionalisasi. “Hal ini diperlukan agar tetap terpelihara dalam memori bahwa Indonesia dan Sudan memiliki hubungan khusus,” paparnya.

Pada kesempatan ini, ia juga menjelaskan, bahwa hubungan antara Indonesia dan Sudan terdapat tiga level komunikasi yang perlu dibangun. Pertama, DPR dan Pemerintah Indonesia akan segera mengucapkan selamat atas pelantikan parlemen dan pelantikan presiden Sudan keesokan harinya. Kedua, peningkatan hubungan *business to business* (b to b) yang sudah menunjukkan *progress* signifikan, perlu terus ditingkatkan. Ketiga, hubungan antar manusia atau antar rakyat yang merupakan hal yang paling mendasar.

Ditempat yang sama, Ketua BKSAP Rofi’ Munawar mengusulkan agar antara DPR RI dan Parlemen Sudan dibentuk *lajnah-lajnah* (komisi-red) untuk menjalin kerja sama yang lebih konkret.

“Lajnah dimaksud meliputi kerja sama antara Komisi Luar Negeri, kerja sama di bidang Peternakan, Pertanian, dan Kelautan, kerja sama di bidang Teknologi dan kerja sama di bidang Kemanusiaan dan Kebudayaan, dan kerjasama ini akan segera di tindaklanjuti,” kata Rofi’.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Mukhamad Mis-



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

bakhun, yang menekankan tentang perlunya kehadiran di ruang politik dengan memperhatikan aspek pembangunan.

“Indonesia memiliki pengalaman pembangunan yang panjang. Sebagaimana Sudan saat ini, Indonesia juga pernah mendasarkan pembiayaan pembangunan dari hasil kekayaan alam, yaitu minyak, dari hasil kekayaan alam tersebut, Indonesia dapat membangun fasilitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Untuk itu Indonesia dan Sudan perlu saling berbagi pengalaman dalam aspek pembangunan” jelas Misbakhun.

Dalam pertemuan ini, Misbakhun juga menyampaikan harapannya agar kerja sama antar parlemen ini dapat menunjang kerja sama antara kedua negara. (nt) foto: iwan armanias/parle/hr

Indikasi Kerugian Negara Harus Diusut Tuntas



Pimpinan DPR RI dan Pimpinan BPK

Negara diindikasikan mengalami kerugian sebesar Rp 208 miliar lebih akibat pelaksanaan Program Bina Lingkungan (BL) BUMN Peduli, Kementerian BUMN. Indikasi kerugian ini harus segera diusut tuntas.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, usai pertemuan antara Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi II DPR, dan Ketua Komisi I sampai Komisi XI DPR, dengan Pimpinan BPK RI, di Gedung Nusantara III, Kamis (28/05/15). Pertemuan yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto ini beragendakan penyampaian hasil pemeriksaan BPK tentang Program Kemitraan dan BL.

“Soal audit program BL, kita kembalikan kepada mekanisme yang berlaku. Hal ini perlu diusut tuntas, karena ini menyangkut uang rakyat, akuntabilitas publik juga harus terpenuhi. Uang itu harus dipertanggungjawabkan oleh stakeholder yang ada di BUMN,” tegas Taufik.

Politisi F-PAN ini menambahkan, program ini harus mendapatkan pengawasan juga dari DPR. Termasuk, program ini juga harus masuk dalam

pertanggungjawaban oleh Kementerian BUMN.

“Ini perlu diaudit juga. Hasil audit itu, ada indikasi penyimpangan lebih dari Rp 200 miliar. Kami harapkan juga dari seluruh Komisi DPR juga melakukan pengawasan,” harap Politisi asal Dapil Jawa Tengah VII ini.

Sebelumnya, Ketua BPK RI Harry menjelaskan, sampai dengan Desember 2014, dana BL BUMN Peduli yang berhasil dihimpun sebesar Rp 1,431 triliun, dan yang tersisa sebesar Rp 193 miliar. BPK menemukan beberapa permasalahan program bina lingkungan BUMN yang mengindikasikan kerugian negara.

“Ada program pencetakan sawah sebesar Rp 208,66 miliar, program pembibitan sapi sekitar Rp 1,45 miliar,

dan program pengembangan (sorgum) sebesar Rp 1,68 miliar. Ada potensi kerugian negara, yaitu program pengembangan sorgum sebesar Rp 9,97 miliar, program pembangunan rusun Rp 4,22 miliar,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo sangat menyayangkan indikasi penggunaan penyimpangan keuangan negara ini. Ia menilai, dana itu setidaknya bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat.

“Dana Program BL untuk cetak sawah atau pembibitan sapi bagi Komisi IV merupakan program bagus, tapi kalau tidak terjadi penyelewengan, ini yang tidak bagus. Ini yang sudah kami khawatirkan dari di periode DPR lalu, baik itu dana KUR, dana CSR, ataupun dana yang dikelola langsung,”

kata Edhy.

Politisi F-Gerindra ini mengilustrasikan, jika dana besar lebih dari Rp 208 miliar ini digunakan untuk mencetak sawah baru, dengan asumsi 1 hektar seharga Rp 60 juta rupiah, berarti menghasilkan kira-kira 3500-an hektar sawah baru. Menurutnya, setidaknya sawah itu memberi kontribusi besar sekitar 21 ribu ton setahun.

“Penyelewengan ini harus diusut tuntas. Ke depan jangan ada kedok lagi. Ini kan uang negara, BUMN adalah aset negara. Bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat yang secara langsung. Kami berharap pimpinan DPR segera menindaklanjuti temuan BPK ini, menyampaikan kepada pihak terkait untuk mengusut secara tuntas,” harap Politisi dari Sumsel I ini. (sf) foto: denus/parle/hr

Generasi Muda Jangan Alergi Politik



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima Perwakilan Mahasiswa Unmer, Malang

Generasi muda diharapkan tidak alergi terhadap politik. Pasalnya, di kehidupan sehari-hari dan masa depan juga ditentukan oleh politik. Untuk itu, pendidikan politik penting diberikan kepada generasi muda.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon usai menerima perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, di ruang rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Rabu (3/06/15).

“Kami harapkan generasi muda tidak alergi terhadap politik. Bagaimanapun juga, politik juga yang menentukan masa depan bangsa kita ke depan. Mereka adalah calon pemimpin bangsa,” tegas Fadli.

Untuk itu, tambah Politisi F-Gerindra ini, pendidikan politik sangat penting diberikan kepada generasi muda. Oleh karena itu, DPR sangat membuka kesempatan kepada siapa saja untuk datang ke Kompleks Parlemen dan

berdiskusi dengan Pimpinan, maupun Anggota Dewan.

“Setiap mahasiswa yang datang ke DPR, kita terima dengan baik,” imbuh Politisi asal Daerah Pemilihan Jawa Barat V ini.

Dalam sesi diskusi, Fadli menjelaskan fungsi tupoksi dari DPR, yang didalamnya terdapat fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran, termasuk fungsi dalam diplomasi maupun representasi terhadap daerah pemilihan.

Ditemui sebelum acara, dosen sekaligus ketua Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi FH Unmer, Abdul Aziz, menyatakan kedatangan perwakilan mahasiswa ini ingin berdiskusi berkaitan dengan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan DPR, sehingga tidak terjadi politisasi anggaran, ataupun politisasi legislasi.

“DPR itu sebagai tulang punggung rakyat, yang kerap kali *performance*-nya dilihat oleh rakyat. Kami berharap DPR menjadi kepanjangan tangan dari rakyat. Kami ingin mendorong DPR dapat mendengarkan aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia, karena Anggota Dewan adalah wakil dari masyarakat, bukan dari partai politik,” jelas Aziz.

Ia menyatakan, hasil diskusi ini akan dikaji, untuk kemudian hasil kajian akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk DPR, dan lembaga negara lainnya. (sf) foto: denus/parle/hr



Pimpinan DPR Lepas Forum Indonesia Peduli Syam



Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah menerima dan melepas Tim Forum Indonesia Peduli Syam

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah di ruang kerjanya Lantai III Gedung Nusantara III Senayan, Kamis (28/5) sore menerima dan melepas Tim Forum Indonesia Peduli Syam. Tim dipimpin Abu Haris akan berangkat ke Turki sebagai Tim Pendahuluan dan akan berada di negara itu sekitar sepekan.

“Malam ini kami *take off* menuju Ankara, Turki. Sesuai saran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akan menghubungi Turki dulu sehingga lebih aman dan legal,” kata Haris.

Menurut Fadli Zon, Tim ini terdiri tokoh-tokoh yang sangat peduli pada masalah di Syria khususnya terkait pengungsi. Keberangkatan Tim sebagai misi kemanusiaan yang terjadi di Syria dan mereka akan ke perbatasan Syria melalui Turki untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Wakil Ketua DPR ini memberikan bantuan sebesar 20 ribu dolar AS dan Rp 100 juta dari Forum Indonesia Peduli Syam.

Sekarang ini kata Fadli, banyak pihak yang salah paham atau kesalahan persepsi, kalau ada kata Syria terkait dengan ISIS meski misinya adalah memberikan bantuan. Ini kesalahan yang sangat fatal. ISIS jelas salah, tetapi masalah kemanusiaan yang terjadi di negara itu masalah besar.

“Banyak sekall pengungsi terlantar, lebih dari 2 juta orang kita harus beri perhatian sebagai warga bangsa. Apalagi Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam maka solidaritas sangat penting,” tegasnya.

Fahri Hamzah menambahkan, Forum ini sangat penting untuk angkat realita apa yang terjadi Syria setelah itu disampaikan di Indonesia. Dia berjanji DPR akan menyampaikan masalah ini kepada kementerian terkait dan pengiriman bantuan tersebut sebagai aspirasi masyarakat.

Pimpinan DPR dari Fraksi PKS ini mengatakan, sekarang anggota DPR juga ditetapkan sebagai diplomat, maka kalau ada waktu perlu diatur pertemuan dengan parlemen Syria. “Karena diundang resmi oleh parlemennya maka perjalanan ini dengan misi diplomatik. Dengan misi diplomatik banyak hal yang bisa dimudahkan,” jelas Fahri. (mp), foto: andri/parle/hr.

DPR Apresiasi Prestasi TNI di AASAM 2015

Dewan Perwakilan Rakyat mengapresiasi prestasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang telah menyematkan prestasi membanggakan di ajang *Australian Army Skill at Arms Meeting* (AASAM) 2015. Dalam gelaran lomba tembak tahunan tingkat internasional yang diselenggarakan di Puckapunyal, Victoria, Australia pada 20-23 Mei 2015 ini, Indonesia menyabet juara umum.

“Saya kira hal ini perlu apresiasi dan perlu kita ucapkan selamat. Semoga prestasi ini memberikan kebanggaan kepada kita,” ucap Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon, saat ditemui usai menerima perwakilan Mahasiswa Universitas Merdeka Malang, di Gedung Nusantara III, Rabu (3/06/15).

Politisi F-Gerindra ini mengaku

bangga dengan prestasi TNI AD ini. Ia berharap prestasi ini dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa TNI cukup kuat berprestasi dan membanggakan,” tambah Politisi asal Jawa Barat V ini.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I Sukamta. Ia menyatakan rasa bangganya terhadap prestasi yang ditorehkan oleh TNI AD ini.

“Prestasi yang membanggakan ini patut diapresiasi. Tentara Indonesia terbukti lebih unggul dari negara-negara lain,” bangga Sukamta, dari Kompleks Parlemen, beberapa waktu yang lalu.

Politisi F-PKS ini menambahkan, walaupun selama ini TNI berlatih dengan segala keterbatasan, tetap dapat



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

membuahkan hasil yang mengharumkan nama bangsa.

“Insya Allah kita akan berusaha terus untuk mendukung peningkatan kapasitas tentara-tentara kita ke depan demi pertahanan negara,” imbuh Politisi asal Dapil DI Yogyakarta ini.

Sebagaimana diketahui, kontingen TNI AD meraih gelar juara umum dengan merebut 67 medali dalam kejuaraan menembak AASAM 2015. Ke-67 medali itu terdiri dari 32 emas, 15 perak dan 20 perunggu.

Sementara tuan rumah Australia menempati urutan kedua dengan perolehan 6 medali emas, 15 perak dan

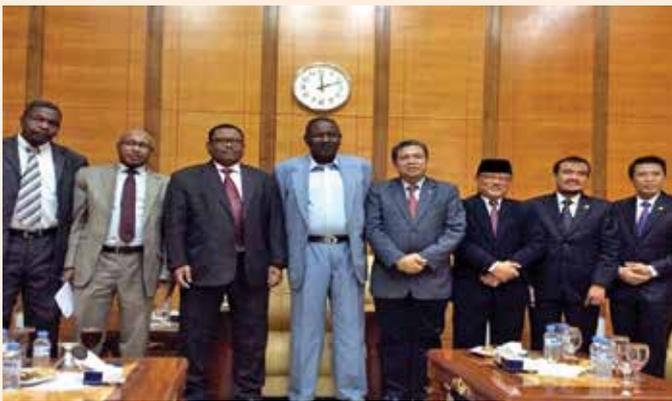
20 perunggu. Disusul Brunei Darussalam di urutan ketiga dengan 5 emas, 4 perak dan 1 perunggu. TNI bisa dikatakan menang telak dengan selisih sangat jauh dari negara lain.

Dengan prestasi itu, Indonesia kembali mengukuhkan kemenangan untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2008 sampai 2014 lalu. Dalam

kompetisi menembak yang berlangsung tahun ini, Indonesia bersaing dengan 15 tim dari 13 negara, yakni Australia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang, Filipina, Thailand, Timor Leste, Singapura, Brunei Darussalam, Kaledonia Baru, dan Tonga. (sf)

foto: denus/parle/hr

DPR Berkomitmen Pererat Hubungan Bilateral Dengan Sudan



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin Delegasi DPR ke Sudan

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin Delegasi DPR memenuhi undangan Pemerintah Sudan untuk menghadiri pelantikan Parlemen dan Presiden baru Sudan. Undangan tersebut dimanfaatkan DPR RI untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Selain menghadiri seremoni pelantikan parlemen dan Presiden Sudan, Delegasi DPR juga melakukan pertemuan dengan Komisi Hubungan Luar Negeri Parlemen Sudan (Persahabatan Parlemen Indonesia-Sudan) dan Ketua Parlemen Sudan dan juga bersilaturahmi dengan mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Sudan, seperti dilansir dalam akun twitter @kawanFH dan @Fahrihamzah.

Delegasi DPR Gelar Pertemuan Dengan PPI Sudan

Dalam rangkaian acara menghadiri undangan pemerintah Sudan, Delegasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan anggota Rofi Munawar dan Muhammad Misbakhun mengadakan pertemuan dengan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Sudan (PPI Sudan) di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sudan.

Turut hadir dalam acara tersebut dua anggota pasukan perdamaian dari Indonesia yang bertugas di Darfur, bagian

Kesediaan DPR RI sebagai representasi negara Indonesia dalam memenuhi undangan dari parlemen Sudan akan berdampak positif pada upaya-upaya nyata peningkatan hubungan bilateral kedua negara ke depan.

Disebutkan, dalam kunjungan itu kedua parlemen sepakat untuk mempererat hubungan dan meningkatkan koordinasi dalam pembentukan Forum Parlemen Asia-Afrika. Sudan telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan perdana Forum Parlemen Asia-Afrika tersebut.

Dalam pelantikan anggota Parlemen baru Sudan, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan pidato. "Dalam pidato itu saya menegaskan komitmen Indonesia untuk terus membantu Sudan," ungkap Fahri Hamzah dalam akun twitternya.

Lebih lanjut Fahri Hamzah menyampaikan bahwa Indonesia akan membantu Sudan membangun demokrasi yang kuat. Kita membawa pesan bahwa Indonesia setuju Sudan menjadi Tuan Rumah pertemuan Asia Africa Parliamentary Group (AAPG) yang pertama. AAPG adalah *Asia African Parliamentary Group* yang dicetuskan saat peringatan 60 tahun KAA bulan lalu. Sudan sebagai negara Afrika kita setuju menjadi tuan rumah pertama," jelasnya.

Lawatan DPR RI ke Sudan selama empat hari berlangsung dari 30 Mei hingga 2 Juni terdiri Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku Ketua Delegasi didampingi anggota Komisi XI Muhammad Misbakhum, Wakil Ketua BKSAP Rofi Munawar. (skr) *foto: dok/parle/hr*



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bertemu dengan PPI Sudan



barat Sudan. Dalam sambutannya, Dubes RI untuk Sudan Burhanuddin Badruzzaman menyatakan bahwa masyarakat Sudan menaruh kepercayaan besar pada mahasiswa Indonesia di Sudan. Hal ini terlihat ketika diadakan pemilihan Ketua PPI Sudan. Pujian terhadap mahasiswa Indonesia di Sudan juga sering didengar oleh Dubes RI.

Pada kesempatan dialog dengan mahasiswa Indonesia, Fahri Hamzah berpesan agar mahasiswa berani punya mimpi yang besar, mimpi akan menggerakkan pikiran dan daya kita untuk mencapainya. Mimpi mahasiswa Indonesia di Sudan secara kolektif akan berperan membangun peradaban Indonesia dan Islam secara keseluruhan. Langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan banyak membaca, bergaul dengan banyak kalangan dan senantiasa belajar dari tiap fenomena kehidupan.

Pada kesempatan yang sama Rofi Munawar menyampaikan perbedaan antara negara-negara bekas jajahan Belanda dan Inggris. Negara-negara bekas jajahan Inggris mendapat akses dan fasilitas pendidikan yang baik. Hal ini

berbeda dengan negara-negara bekas jajahan Belanda yang justru dibiarkan bodoh. Untuk itu Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda, harus bekerja keras untuk mengejar ketinggalan.

Hal ini harus disikapi secara positif. Menurutnya mahasiswa Sudan harus proaktif mencari tahu dari PPI di negara-negara lain tentang akses beasiswa, fasilitas belajar dan lain-lain yang disediakan oleh pemerintah Indonesia.

Apabila terdapat persoalan yang bersifat struktural terkait fasilitas belajar, Muhammad Misbakhun bersedia menjembatani. Ia akan mengkomunikasikan dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia. Mahasiswa Indonesia di Sudan terlihat antusias dengan dialog pada malam itu.

Acungan tangan ingin bertanya dan tukar pikiran menyebar di seluruh ruangan. Tukar pikiran dan dialog terus berlanjut bahkan setelah acara tersebut ditutup oleh Dubes RI. Demikian keterangan yang dilansir dalam akun twitter @kawanFH. (skr) foto: dok/parle/hr

Harga Fluktuatif Cabai dan Bawang Merah Rawan Permainan Harga

Menjelang bulan puasa, harga bawang kebutuhan pokok seperti cabai merah dan bawang merah terus naik. Kenaikan tersebut terjadi karena naiknya permintaan secara signifikan, sedangkan pasokan dalam negeri tidak cukup. Berdasarkan laporan BPS, kenaikan tertinggi terjadi di Medan sebesar 95% dan Banda Aceh sebesar 94%.

Hal itu dikatakan Heri Gunawan, Wakil Ketua Komisi VI DPR Rabu (3/6) di Jakarta. Menurutnya, kenaikan itu bisa dikontrol jika Pemerintah mempunyai mekanisme antisipasi yang lebih sistematis dan permanen. "Ini kan, sudah sering terjadi setiap tahun, maka mestinya sudah bisa diantisipasi sejak dini, baik dari sisi produksi sampai pengamanan stok," jelasnya dengan menambahkan, sejauh ini kebijakan pemerintah masih bersifat insidental. "Ujug-ujug impor."

Politisi Fraksi Partai Gerindra menegaskan, impor seharusnya adalah langkah terakhir. Apalagi sebelumnya Menteri Perdagangan telah menjamin stok kebutuhan pokok untuk keperluan bulan puasa sampai Idul Fitri dalam posisi aman. Karenanya, kebijakan impor jangan tergesa-gesa.

Dia mengemukakan, jika impor sampai terjadi, maka itu semakin memperkuat pandangan bahwa pemerintah sedang bermasalah dalam hal produksi



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

dalam negeri yakni fluktuasi harga, dan posisi stok. Dari sisi produksi, terdapat masalah yang sangat serius yang menyebabkan rendahnya produktifitas, terutama terkait penyusutan lahan yang sudah banyak beralih fungsi, sehingga petani hanya memanen tujuh ton untuk setiap satu hektare. Ditambah lagi, realisasi cetak lahan baru belum tampak.

Minimnya produksi tersebut menyebabkan harga cabai merah dan bawang merah sangat fluktuatif dan

rawan permainan harga. Saat ini, cabai merah sudah berada pada kisaran Rp.20.00/kg, sedangkan harga bawang merah berada pada posisi Rp. 25.000/kg. "Itu berarti sudah lampu merah, atau peringatan. Dari sisi stok, peran Bulog belum maksimal dalam mengelola stok pemerintah. Serapan Bulog sangat minim, karena terkekang kewenangannya yang terbatas.

Aspek lain yang juga harus diperhatikan pemerintah adalah faktor distribusi yang terkait langsung dengan penyediaan/optimalisasi sarana distribusi, termasuk koordinasi yang kuat dari gudang/pelabuhan sampai penyedia angkutan.

Untuk itu, Heri mendorong penuh pemerintah untuk sesegera mungkin mengeluarkan aturan teknis terkait dengan pengelolaan barang kebutuhan pokok yang lebih baik. Sehingga, kebijakan pemerintah akan lebih sistematis, permanen, dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Apalagi itu susah menjadi amanat UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang sampai hari ini tidak bisa dieksekusi sama sekali karena tidak adanya peraturan turunan, baik PP, Perpres maupun Permen. Misalnya, Perpres tentang Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Permendag tentang distribusi barang. (spy,mp) foto: naefuroji/parle/hr

RUU Penjaminan Diharapkan Atasi Persoalan UKM



Ketua Panja RUU Penjaminan Firman Subagyo

Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan (RUU Penjaminan) merupakan RUU inisiatif DPR yang diusulkan 39 anggota dewan kepada Badan Legislasi DPR RI (Baleg DPR), diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang masih dihadapi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sampai saat ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua Panja RUU Penjaminan Firman Subagyo kepada media usai memimpin Rapat Panja RUU Penjaminan di Ruang Rapat Baleg, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (01/06)

“RUU Penjaminan ini merupakan salah satu terobosan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang masih dihadapi UKM sampai hari ini,” kata Firman.

Dijelaskan Firman, saat Indonesia mengalami krisis ekonomi di tahun 1998 ada dua lembaga yang menjadi bumer perekonomian Indonesia, yaitu UKM dan BUMN. Walaupun cukup berat dalam melakukan terobosan-terobosan agar tetap survive.

“Ketika itu, UKM dengan segala kekurangannya justru survive karena ada produk-produk yang mempunyai nilai ketika kurs melonjak sampai Rp 15.000,-/Dollar, yang diuntungkan adalah UKM,” kata Firman yang juga Wakil Ketua Baleg ini.

Hanya yang menjadi persoalannya ketika itu, tegas politisi Partai Golkar ini, UKM tidak memiliki instrumen yang kuat, sehingga UKM sangat sulit untuk mendapatkan satu akses kemudahan di bank.

“Dan sampai hari ini ternyata UKM itu tidak diperhatikan oleh negara yang ketika itu UKM sebagai penyelamat negara. Bahkan setelah pemerintah merecover perekonomiannya, negara tidak hadir untuk UKM,” ujar Firman.

Menurut Firman, belajar dari

pengalaman-pengalaman dari negara-negara lain seperti Banglades menjadi motor penggerak perekonomian disana menggunakan ekonomi kerakyatan. Sementara di Korea, lembaga penjaminan untuk UKM sangat luar biasa.

“Hari ini kita memiliki program yang namanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang nilainya triliunan, namun KUR yang tujuannya untuk UKM itu tidak bisa sampai ke bawah. Petani dan nelayan masih sulit untuk mendapatkan kredit dari Bank, sementara UKM sendiri seperti pengrajin di Yogya dan Bali masih kesulitan mendapatkan kredit bank dan masih banyak menggunakan modal-modal daripada rentenir,” papar Firman.

Oleh karena itulah, kata anggota Komisi IV ini, pentingnya agar RUU Penjaminan ini segera dibahas dan disahkan menjadi sebuah UU.

“Tadi diingatkan oleh Pak Tifatul Sembiring yang namanya IT juga sangat membantu untuk melakukan percepatan-percepatan prosesing. Oleh karena itu didalam RUU Penjaminan ini secara kooperatif membantu terhadap proses dari apa yang menjadi hambatan UKM selama ini,” pungkasnya.

(sc) foto: dok/parle/hr

Komisi VIII Akan Pertanyakan PMA Larangan Anak Berhaji

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi dikeluarkannya PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 29/2015 tentang aturan haji satu kali. Namun, ia mempertanyakan poin lain dalam peraturan tersebut yang isinya melarang anak usia 12 tahun ke bawah untuk pergi haji. Hal tersebut diungkapkannya kepada Parlemen, Senin (01/06).

“DPR hanya menanyakan soal haji satu kali,hal itu sebagai solusi untuk mengurangi daftar antri haji yang sangat panjang, selain itu kewajiban haji memang hanya satu kali. Sedangkan

jeda waktu selama sepuluh tahun yang tercantum dalam PMA tersebut merupakan murni inisiatif dari pemerintah, namun sesuai dengan semangat DPR untuk mengurangi daftar antri haji yang sangat panjang dan lama. Sementara terkait pelarangan anak-anak usia 12 tahun ke bawah sama sekali tidak disinggung dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah selama ini,” jelas Saleh.

Belakangan, ia sempat menerima aduan dari beberapa anggota masyarakat terkait salah satu poin dalam PMA tersebut yang melarang anak-



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

anak usia 12 tahun ke bawah untuk berhaji itu. Pasalnya, menurut mereka, usia 12 tahun itu ada kemungkinan seseorang sudah melewati akil baligh. Sehingga bisa dikatakan sudah dewasa secara agama, dan sudah wajib hukumnya untuk menjalankan kewajiban dalam rukun Islam yang salah satunya pergi haji jika mampu. Dengan adanya pelarangan tersebut secara langsung

tentu melanggar Hak asasi manusia.

“Peraturan Menteri Agama itu memang murni kewenangan Menteri Agama. DPR hanya bicara soal kebijakan umum yang perlu diatur dalam Undang-undang. Peraturan teknis yang bersifat operasional diatur dalam PP dan aturan turunan di bawahnya termasuk PMA tersebut menjadi hak pemerintah,” paparnya.

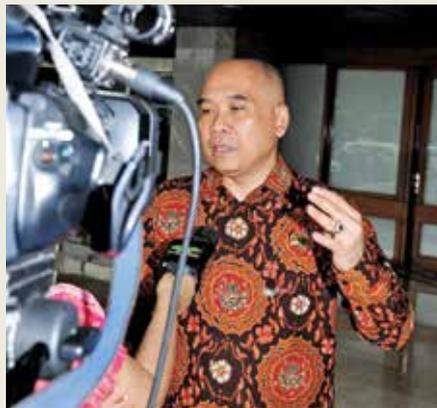
Meski demikian, ditegaskan Politisi dari Fraksi PAN Dapil Sumatera Utara II ini, jika memang poin PMA tersebut meresahkan masyarakat, pihaknya akan mempertanyakan kepada pihak Kementerian Agama. Setidaknya diungkapkan Saleh, landasan berpikir mengapa anak usia 12 tahun ke bawah tidak boleh berhaji. (Ayu) foto: andri/parle/hr

Bawang Impor Ilegal Masuki Pasar Tradisional

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyatakan Bawang Merah Impor Ilegal sudah mulai masuk ke pasar-pasar tradisional. Modusnya dilakukan melalui kendaraan roda empat ukuran kecil agar lolos dari pengawasan Badan Pengelola Pekerja Bongkar Muat, seperti di Pasar Induk Kramat Jati, Tanah Tinggi, Pasar Minggu dan Cibitung.

Bawang tersebut berasal dari negara Filipina melalui Medan Sumatera Utara. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan di Jakarta Jum'at (29/5) lalu.

Heri mengemukakan, menjelang bulan puasa, beberapa komoditas kebutuhan pokok mulai merangkak naik, Pemerintah (cq Kementerian Perda-



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

ngan) harus lebih aktif mencermati fluktuasi harga-harga tersebut. “Jika tidak, maka bisa dipastikan inflasi akan

semakin tinggi dan kondisi ini sangat memperhatikan,” tegasnya.

Menurutnya, fluktuasi beberapa harga-harga komoditas dipengaruhi oleh 3 hal yaitu praktik kecurangan, permainan harga komoditas oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan secara tidak wajar dan importasi komoditas secara ilegal. Tiga hal itu telah mendistorsi pasar domestik sehingga tidak berjalan secara efisien.

Ia menilai, Pemerintah sepertinya tidak siap dalam merespon praktik kecurangan, permainan harga dan importasi komoditas ilegal. Dari aspek kebijakan, Kementerian Perdagangan tidak memiliki prosedur teknis dalam rangka mengantisipasi “rembesan” komoditas ilegal di pasar-pasar tradisional. Padahal, praktik-praktik tersebut sudah berlangsung cukup lama dengan modus yang relatif sama.

(spy,mp) foto: iwan armanias/parle/hr

BPIH Mahal Karena Mark-Up dan Tumpang Tindih Pembiayaan

Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Syafi'i menegaskan, ternyata biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang selama ini dirasakan mahal, setelah disisir banyak sekali *mark up* dan juga tumpangtindih pembiayaan yang diambil kepada jemaah padahal masih bisa dibayar lewat APBN.

Ke depan, ia berharap, uang jemaah meskipun sudah mencukupi Rp 25 juta untuk dapat porsi, itu harus tetap di rekening jemaah, sampai saat dia berangkat. Dengan setoran awal Rp 25 juta kemudian jemaah menunggu 20 tahun, tetapi pada saat akan berangkat masih harus membayar setoran akhir.

“Ini yang akan terus kawal supaya tidak ada perubahan sebab sudah menjadi keputusan Raker Komisi VIII dengan Kemenag. Kita tak mau ganti personil di Komisi VIII kemudian keputusan ini diabaikan. Kami akan kawal untuk pemberangkatan haji tahun depan BPIH yang Rp 25 juta sebelum sampai keberangkatan sehingga tidak kehilangan manfaat dari uang yang disetorkan itu,” katanya kepada Parlemen Senin (01/06) di Jakarta.

Menurut Syafi'i, boleh diperjanjikan akan digunakan un-



Anggota Komisi VIII DPR Mohammad Syafi'i

tuk kemaslahatan tetapi menurut hukum syariah, harus dengan persetujuan yang punya uang. Kalau yang punya uang setuju untuk kepentingan kemaslahatan dipersilahkan-

kan, tapi tidak dengan cara yang culas seperti sekarang.

“Dana setoran calon jamaah haji Rp 25 juta pindah ke rekening Menag dan Kemenag anggap itu uang dia. Apa indikasinya, setiap mensubsidi BPIH dari *direct cost*, padahal *direct cost* itu bunga dari simpanan jamaah yang 25 juta. Tapi bilang pemerintah mensubsidi padahal sejatinya uang jamaah yang mensubsidi Kemenag. Jangan dibalik,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini menyatakan sudah menghitung dengan Dirut-dirut Bank Syariah, dengan Rp 25 juta kalau dikalikan BI Rate 6% saja, 6 tahun uangnya sudah menjadi Rp 38 juta. “Jadi kalau sampai 20 tahun dikalikan 6% karena akan dideposito kali 20 tahun, kali 25 juta saya kira begitu calon jamaah haji berangkat, tidak harus menambah pelunasan, tetapi akan mengantongi deviden,” ujarnya.

Dikatakan pula bahwa kita harus nyatakan, Kemenag belum pernah mensubsidi haji tetapi dengan cara-cara yang culas Kemenag kemudian merampok uang jamaah yang katanya untuk mensubsidi kegiatan di Kemenag. Selama

ini belum pernah dipindahkan atau atas nama rekening jamaah, nyatanya ada di kantong Kemenag, lalu dibidang mensubsidi.

Karena itu sambung dia, akan berjuang keras agar pelaksanaan haji jangan di tangan pemerintah. Pemerintah dinilai tidak mampu, hanya mampu memanfaatkan dana-dana yang ada. “Kita mau harus ada tabung haji,” ungkap Syafi’i.

BPIH tahun ini berhasil diturunkan dari 3.195 dolar jadi 2717 dolar sekitar 502 dolar atau hampir 6,7 juta, disamping kita berhasil menyisir penggunaan *indirect cost* yang memanfaatkan tabungan jamaah haji yang dipindahkan ke rekening Kemenag, itu disisir hampir 1,4 T.

Saat ditanya, meski turun BPIH tahun ini tetapi hampir sama nilai rupiahnya dengan tahun lalu, Syafi’i balik bertanya, bagaimana kalau tidak turun. “Kalau sekarang 33,9 juta ditambah 502 dolar kali Rp 13 ribu (Rp 6,7 juta) maka BPIH bisa menjadi sekitar Rp 40 juta. Jadi pengurangannya sudah luar biasa. Perjuangan DPR jelas kongkrit,” katanya lagi. (mp) foto: andri/parle/hr

MKD Sosialisasikan Kode Etik dan Tata Beracara

Majelis Kehormatan DPR RI (MKD) mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan diharapkan target seluruh anggota dari 10 fraksi yang ada di DPR dapat mengikuti pembekalan ini.

Pimpinan dan anggota MKD terlibat langsung dalam proses sosialisasi, yang pada Jumat (29/5) diikuti tiga fraksi. Ketua MKD Surahman Hidayat dan anggota Hang Ali Saputra Syah Pahan menyampaikan penjelasan kepada anggota Fraksi PAN sedangkan Wakil Ketua Junimart Girsang kepada anggota FP Hanura dan FP Demokrat.

Wartawan sempat menanyakan efektifitas peraturan apabila pelanggaran kode etik dilakukan oleh anggota dewan sebelum mengikuti proses sosialisasi. “Peraturan DPR RI ini tentu



Anggota MKD DPR Hang Ali Saputra Syah Pahan

berlaku sejak disahkan, begitu diketokan palu segera bisa digunakan. Jadi tidak ada alasan karena belum mendapat sosialisasi kemudian bebas dari sanksi,” kata Hang Ali usai kegiatan di Gedung

DPR, Senayan, Jakarta.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut sejumlah pasal mendapat perhatian dari anggota dewan diantaranya tentang pelanggaran tidak menghadiri rapat yang merupakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebanyak 40 persen dari jumlah rapat AKD dalam satu kali masa sidang tanpa keterangan.

Pimpinan AKD juga mendapat pertanyaan tentang sanksi bagi anggota yang melanggar kode etik yaitu sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD.

Sedangkan sanksi berat adalah pemberhentian sementara paling singkat selama tiga bulan atau pemberhentian sebagai anggota dewan. (iky) foto: andri/parle/hr

Tindak Tegas Perekam dan Penyebarluas Video Porno Anak

Anggota Komisi VIII DPR RI, Choirul Muna meminta Polisi untuk terus mengusut dan menindak tegas pelaku yang merekam dan menyebarluaskan video porno anak di bawah umur. Hal tersebut disampaikan kepada Parlemen, Jumat (30/5).

“Saya sangat menyesalkan adanya peristiwa (video porno anak di bawah umur) itu. Saya berharap polisi untuk me-

ngusut tuntas kasus tersebut dan menindak tegas pelakunya, baik yang merekam ataupun yang mengedarkannya. Karena saya yakin di dalamnya juga melibatkan anak-anak. Ini sungguh hal yang tidak bisa ditolerir,” jelas politisi dari Fraksi Nasdem.

Ditambahkannya, apa yang dilakukan anak-anak itu menjadi satu bentuk penurunan moral anak bangsa, yang



disebabkan oleh berbagai hal. Diantaranya pengaruh negatif media massa, kurangnya pengawasan keluarga serta minimnya pendidikan agama.

Oleh karena itu ia berharap penanganan kasus ini jangan hanya berhenti pada tertangkapnya pelaku pengedar video itu saja, melainkan juga hukuman berat yang harus dijatuhkan kepada pelaku untuk menimbulkan efek jera. Tidak hanya itu, pemerintah juga diharapkan untuk lebih tegas lagi dalam menerapkan berbagai peraturan serta pengawasan terhadap konten-konten di media massa, baik online maupun cetak.

“Disini juga diperlukan peran pemerintah untuk kembali menumbuhkan moral anak bangsa lewat pendidikan dan bimbingan agama kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Saya melihat hal itu masih sangat kurang. Oleh karenanya kami akan terus mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan, pendidikan dan bimbingan tadi,” ungkapnya.

Disisi lain, DPR juga akan mendukung pemerintah terhadap berbagai program perlindungan anak melalui penguatan tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satunya dengan peningkatan anggaran Kementerian tersebut.



Anggota Komisi VIII DPR Choirul Muna

“Kami berharap lewat dukungan anggaran yang cukup terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Kementerian ini dapat langsung “bergerak” dan tidak hanya mengoordinasi Kementerian dan lembaga lain saja,” tandasnya. (Ayu) foto: andri/parle/hr

Komisi XI Pantau Kinerja Pengendalian Inflasi Di Jatim



Tim kunjungan spesifik Komisi XI DPR pertemuan dengan TPID Jatim

Diperlukan strategi yang tepat dan langkah-langkah nyata guna mengendalikan tingginya tingkat inflasi di daerah-daerah, terutama di Provinsi Jawa Timur yang menduduki posisi ketiga setelah Banten dan DKI Jakarta akan tingginya tingkat inflasi daerah.

Demikian salah satu hal yang mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR ke Provinsi Jawa Timur dan membahas pengendalian

inflasi daerah, Jum'at (29/5).

Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan dalam sambutannya mengemukakan bahwa dirinya beserta rombongan ingin mendengar secara langsung bagaimana strategi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan tugas dan fungsinya dalam mengendalikan tingkat inflasi di daerah Jawa Timur.

Politisi Partai Demokrat ini mengakui

jajaran Komisi XI DPR RI merasa perlu memastikan bahwa TPID Jawa Timur bekerja maksimal, mengingat Jatim berada di urutan tiga secara nasional tertinggi tingkat inflasinya.

“Kami ingin mendapat penjelasan secara kongkrit langkah-langkah apa saja yang akan dan sedang dilakukan TPID Jatim untuk mengendalikan inflasi,” ungkap Marwan.

Lebih lanjut, politisi Dapil Lampung ini juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi terutama menjelang datangnya bulan Ramadhan dan Lebaran, dimana biasanya terjadi peningkatan harga-harga komoditas dipicu tingginya tingkat konsumsi masyarakat.

Ikut serta dalam rombongan Tim Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI antara lain Marwan Cik Asan (Ketua Tim/Watua Komisi XI), Indah Kurnia, Henry Kurniadi, Andreaseddy Susetyo, Edison Betaubun, Mukhamad Misbakhun, Wilgo Zainar, Sumail Abdullah, Amin Santono, Evi Zainal Abidin, Sungkono, Hadi Zainal Abidin, Abdul Kharis Al-masyhari, Zulkieflimansyah, Donny Ahmad Munir, Johnny G. Plate dan Ahmad Sahroni. (odjie) foto: naefuroji/parle/hr

Perlu Perpres Penetapan dan Penyimpanan Kebutuhan Pokok

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menyayangkan, Kementerian Perdagangan belum memiliki perangkat regulasi teknis yang mengatur tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok. UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang sudah disahkan 2014 sepertinya “tidak mempunyai kaki”. Lumpuh! Muncul pertanyaan, jadi selama ini pemerintah kerja apa?

Tidak adanya peraturan turunan seperti Perpres tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok, Kementerian Perdagangan tidak mempunyai panduan teknis untuk mengendalikan dan mengelola barang kebutuhan pokok.

“Pantas saja, Kementerian Perdagangan kelihatan bingung dan tidak mempunyai arah sama sekali dalam ihwal pengelolaan dan pengendalian barang kebutuhan pokok yang makin hari makin melonjak,” tegas politisi Gerindra di Jakarta, Jumat (29/05).

Akibatnya, harga barang kebutuhan pokok periode Mei 2015 mulai menunjukkan tren naik. Di pasar-pasar tradisional, harga beras (medium) naik pada



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

kisaran Rp.10.800/kg, minyak goreng pada kisaran Rp.11.300/kg, bawang putih pada kisaran Rp.23.000/kg, gula pasir pada kisaran Rp.12.700/kg, dan daging pada kisaran Rp.108.000/kg.

Naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok tersebut, lanjut dia, akan sangat memberatkan masyarakat. Mereka akan mengalokasikan pengeluaran rumah tangga lebih tinggi akibat kenaikan harga BBM, LPG dan TDL. Alokasi pengeluaran itu bahkan bisa mencapai 40%.

Kepada Kementerian Perdagangan dia mendesak untuk mengantisipasinya sejak dini. Jika tidak, kenaikan harga barang tersebut akan berdampak pada

kenaikan inflasi. Saat ini, berdasarkan laporan dari Bank Indonesia (BI), laju inflasi pada April 2015 sudah mencapai 6,79 persen. Laju inflasi tersebut adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Filipina dan Thailand.

Selanjutnya Heri mendorong pemerintah segera mengeluarkan Perpres tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok. Alasannya, barang kebutuhan pokok sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang menyebabkan pengeluaran anggaran rumah tangga yang tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kenaikan inflasi. Dengan Perpres tersebut akan mengatur kewenangan Menteri Perdagangan secara lebih jelas dan tegas.

Saat ini, kewenangan Menteri Perdagangan masih terbatas pada kondisi-kondisi normal, namun jika dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu (luar biasa) seperti terganggunya perdagangan nasional, gangguan pasokan, dan kondisi harga diatas harga acuan, maka Menteri perdagangan akan kelimpungan dan kacau. (spy,mp) foto: iwan armanias/parle/hr

CSR PT FI Diharapkan Dapat Tingkatkan SDM Warga Papua



Tim kunspek Komisi VIII DPR berdialog dengan siswa IPN

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, berharap agar dana CSR PT Freeport dapat benar-benar dipergunakan dalam meningkatkan SDM warga Papua. Dana CSR (*corporate social responsibility*) tidak boleh hanya untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Lebih dari itu, dana CSR harus bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat di daerah pertambangan itu.

Saleh bersama anggota Komisi VIII yang terdiri dari Maman Imanul Haq, Achmad Mustaqim, M. Iqbal Romzi, Choirul Muna Chozin, M Nur Purnamasidi, Syamsul Luthfi dan Hamka Haq ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke Timika untuk mengetahui program



CSR dan antisipasi bencana akibat pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport.

“Kami sudah melihat program-program CSR PT Freeport. Kami meninjau Institut Pertambangan Nemangkawi sebagai BLK, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, dan juga panti anak yang ada di Timika. Program-program itu sangat baik. Namun, harus ada diversifikasi program terutama untuk memberdayakan dan merubah cara pandang masyarakat Papua agar mampu membangun tanah Papua dengan tangan

putra-putri terbaik Papua,” demikian disampaikan Saleh saat berdialog dengan management PT Freeport, belum lama ini.

Selain itu, PT Freeport diingatkan agar melakukan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di Papua. Melalui sinergi itu, PT Freeport diharapkan dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Bagaimanapun, pembangunan di daerah tidak boleh menafikan kontribusi

pemerintah pusat maupun daerah.

“Jangan sampai ada kesan bahwa PT Freeport lebih memperhatikan masyarakat Papua. Bukankah kami datang kesini sebagai bentuk perhatian dan keseriusan dalam membangun Papua? Begitu juga komisi-komisi lain di DPR yang sudah datang lebih dahulu. Semua ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan DPR sekaligus untuk mengingatkan PT Freeport akan kewajibannya pada masyarakat” tegas Politisi dari Fraksi PAN. (Ayu) foto: ayu/parle/hr



Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis

RUU Arsitek Perkokoh kelestarian kebudayaan Indonesia khususnya

RUU Arsitek Perkokoh Kelestarian Budaya Indonesia

yang terkait dengan pola rancangan bangunan yang bernuansa etnik dan budaya nasional.

Pendapat itu disampaikan oleh Ketua Komisi V DPR Fahri Djemi Francis se usai Kunker Yogyakarta dalam menerima masukan terkait RUU Arsitek, baru-baru ini.

Secara kronologis, RUU Arsitek telah terdaftar dalam long list Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode keanggotaan 2004-2009. Pada periode 2009-2014 telah sampai pada tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Pada periode keanggotaan 2014-2019

diusulkan kembali untuk masuk kedalam Prolegnas dan telah ditetapkan menjadia prioritas tahun 2015.

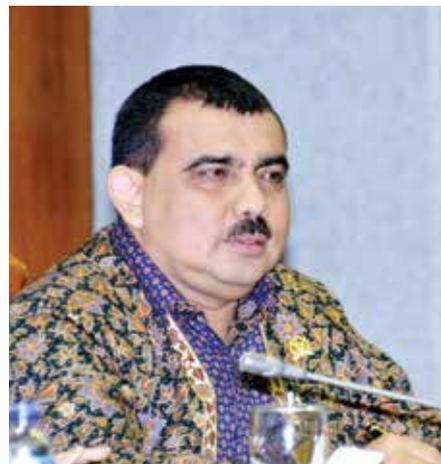
Menurutnya, secara yuridis keberadaan profesi arsitek dan pekerjaan arsitektur secara tidak langsung diatur dalam UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, dan UU No. 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. “Namun hingga saat ini belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur dan menaungi keberadaan profesi arsitek,” jelasnya. (Si)

Foto: rizka/parle/hr

Perlu Gebrakan Untuk Kendalikan Populasi Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk terus mengkhawatirkan. Dibutuhkan gebrakan yang masif dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menekan laju tersebut. Kampanye pengendalian penduduk pun menjadi keniscayaan untuk disampaikan hingga ke desa-desa.

Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir (dapil Jateng II) menyampaikan hal tersebut kepada Parlementaria, Jumat (29/5). Menurut Mahir, prediksi populasi penduduk Indonesia pada 2035 sekitar 305 juta jiwa. Bila pertumbuhan penduduk tersebut tidak dibarengi dengan kualitas hidup, bisa mengancam kerawanan sosial di nege-



Anggota Komisi IX DPR Ali Mahir

ri ini. Misalnya, angka pengangguran yang tinggi dan distribusi pangan yang tidak merata.

Seperti diketahui, Kepala BKKBN yang baru saja dilantik, Surya Chandra Surapaty, bertekad akan menggalakkan kembali program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, dia juga akan menurunkan angka total fertilitas (kelahiran) yang selama sepuluh tahun terakhir mengalami stagnasi di angka 2,6. Diupayakan angka tersebut turun menjadi 2,1 per perempuan usia 14-49 tahun.

Dikatakan Mahir, “Pertumbuhan penduduk rata-rata 3,7 juta per tahun.

Ini tak bisa dianggap remeh. Saya justru ingin menyatakan bahwa semangat program ini harus dibumikan, tidak hanya dalam seminar atau diskusi-diskusi. Ada beberapa hal yang mesti ditekankan saat ini, yaitu sosialisasi dan edukasi hingga tingkat pedesaan. Saya belum melihat ada brosur, stiker, spanduk, atau baliho di tingkat kabupaten. Kalaupun ada, sangat sedikit jumlahnya.”

Diakui politisi Partai Nasdem tersebut, tenaga penyuluh untuk sukseskan program KB ini sangat minim. Tapi, program pengendalian penduduk tak boleh berhenti walau jumlah tenaga penyuluh belum ditambah.

“Menurut saya, sembari mendorong penambahan tenaga penyuluh maupun perangkat satuan kerja di daerah, kampanye, sosialisasi, dan edukasi sudah harus dilakukan, baik lewat media cetak maupun elektronik.”

Di antara program unggulan BKKBN, lanjut mahir, adalah GenRe (generasi berencana) yang ditujukan bagi kaum muda untuk mengatur waktu pernikahan dan kelahiran. “Kegiatan kampanye GenRe itu baik. Tapi, cakupannya sangat sedikit. Intinya bagaimana Kepala BKKBN yang baru ini bisa meneruskan program yang sebelumnya sudah baik dan efektif. Namun harus bisa melakukan program

kreatif lainnya. Bila bisa meyakinkan DPR, saya yakin semua mendukung,” imbuhnya.

Kepala BKKBN yang baru, imbau Mahir, agar membangun pemahaman kepada masyarakat bahwa tugas pengendalian penduduk bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan BKKBN. Semua lapisan masyarakat harus diberi pemahaman yang sama tentang tugas penting mengendalikan populasi penduduk Indonesia. “Kita tunggu gebrakan BKKBN yang lebih solutif, kreatif, dan efektif,” tutup mahir. (mh)

foto: naefuroji/parle/hr

Program KB Harus Masuk Layanan BPJS Kesehatan



Anggota Komisi IX DPR Ayub Khan

Program Keluarga Berencana (KB) harus sudah masuk dalam layanan BPJS Kesehatan. Ini penting, untuk

mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan indeks manusia Indonesia.

Demikian penegasan Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan (dapil Jatim IV) saat dihubungi baru-baru ini. Menurut Ayub, BKKBN perlu bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar ada layanan di sektor kesehatan reproduksi yang bisa terlayani dengan baik. Pernyataan Ayub ini menanggapi tekad Ketua BKKBN yang baru Surya Chandra Surapaty untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menggalakkan kembali program KB.

Seperti diketahui, BKKBN ingin meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka fertilitas (kelahiran) dari 2,6 menjadi

2,1 per perempuan usia 14-49 tahun. “Saya sangat setuju dengan program itu, terutama penekanan pada generasi muda. Untuk itu, diharapkan ada sinergi di antara semua program pembangunan nasional,” katanya.

Ayub menambahkan, generasi muda yang harus mendapat perhatian serius adalah pasangan usia subur muda paritas rendah (Pusmupar). Kelompok masyarakat ini harus menjadi target penyuluhan yang masif dengan mengkampanyekan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

“Kita harus punya data yang akurat tentang kondisi keluarga termasuk keikutsertaannya dalam ber-KB. Untuk itu, kita perlu mendukung pelaksanaan pendataan keluarga 2015 yang saat ini sedang berjalan,” harap politisi Partai Demokrat itu. (mh) *Foto: Naefuroji/parle/od*

Pembekalan PPIH Tingkatkan Kualitas Haji

Salah satu kunci penting dalam peningkatan kualitas haji adalah penyiapan tenaga petugas haji yang profesional dan berdedikasi tinggi. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dalam sambutannya di acara Pembekalan Petugas PPIH Arab Saudi Tahun 1436 H/ 2015M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (3/6).

“Keberadaan saudara, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji

(PPIH) sangat penting, ada payung hukum yang mengikat PPIH yang diamanahkan Undang-Undang. Jangan main-main, ini pekerjaan serius, harus dicemati dan dijaga amanah yang dititipkan. Saudara adalah orang-orang terpilih, dan takdir Tuhan menjadi bagian dari PPIH,” ucap Saleh.

Dalam pembekalan yang juga dihadiri oleh Menteri Agama RI, Para pejabat eselon I Kementerian Agama, Perwakilan Kementerian Kesehatan, Perwakilan Kapolri, dan



Perwakilan Panglima TNI ini, Saleh mengingatkan beberapa hal kepada para peserta. Pertama, ia berharap peserta bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan dan pembekalan ini. Anggaran negara akan sia-sia jika peserta tidak memanfaatkan momentum tersebut.

“Kita akan melayani tamu Allah bukan melayani diri sendiri. Pelajari dan ikuti aturan dan ketentuan yang ada terutama di Arab Saudi sehingga siap mengabdikan,” tegas Politisi dari Dapil Sumatera Utara II ini.

Saleh berpesan agar petugas haji diminta memperbaiki niat, misalnya niat haji gratis. Niat seperti itu harus dihapuskan. Selain itu Saleh mewakili Komisi VIII secara keseluruhan berharap agar petugas haji selalu mengutamakan kepentingan jemaah di atas kepentingan pribadi. Karena tugas utama PPIH adalah melayani jemaah. Jangan sampai niat ibadah malah meninggalkan kewajibannya melayani jemaah haji lainnya.

Ditambahkannya, selama di Arab Saudi, PPIH harus selalu berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Karena sebagaimana diketahui tidak sedikit jemaah haji Indonesia yang tidak dapat berbahasa Arab, bahkan tidak sedikit juga jemaah haji daerah tidak bisa berbahasa Indonesia. Oleh karena itu ia meminta layanilah dengan baik, karena tugas PPIH merupakan tantangan. Ia berharap petugas sabar dalam melayani jemaah sehingga jemaah tersebut bisa menjadi haji mabrur.

Keempat, seluruh petugas haji diharapkan dapat menjaga nama baik bangsa Indonesia. Petugas haji dan seluruh jemaah haji Indonesia yang berjumlah 168.800 orang yang



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

merupakan duta-duta Indonesia di Saudi. Seluruh negara Islam di dunia selalu memuji jemaah haji Indonesia.

“Semua itu harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan sehingga Islam Indonesia bisa diidentikkan dengan Islam yang ramah, sopan, dan damai. Dengan begitu, Kami titipkan 168 ribu jemaah haji Indonesia ini, jangan pernah memarahi dan meninggalkan jemaah,” pesan Daulay mengakhiri sambutannya. (Ayu) foto: andri/parole/hr

Kebijakan Pemerintah Pusat Hambat Pengendalian Inflasi Daerah



Tim kunspek Komisi XI DPR saat pertemuan dengan TPID Jatim

Semangat dan berbagai strategi yang disusun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam meredam gejolak inflasi justru kerap mentah ketika dihadapan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tak sejalan. Contohnya, saat harga beras, bawang merah, cabai

rawit, telur ayam ras dan daging ayam ras (*volatile food*) relatif stabil lalu tiba-tiba pemerintah pusat menaikkan harga BBM, LPG 12kg dan Tarif Dasar Listrik (*Administrated Price*), tentu saja kebijakan tersebut langsung mengerek harga kebutuhan bahan pokok dan

berdampak tekanan pada laju inflasi di berbagai daerah.

Demikian salah satu hal yang dikemukakan Sungkono, anggota Komisi XI DPR RI saat berdiskusi dengan TPID Jawa Timur dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di ruang pertemuan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Surabaya baru-baru ini.

Lebih lanjut politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan bahwa naiknya harga beras di pasaran tidak dibarengi dengan kenaikan harga gabah di tingkat petani sehingga disparitas harga beras dan gabah tidak dinikmati oleh para petani. “Jika harga beras mahal, tapi harga gabah di petani murah saya mensinyalir adanya praktek “ijon” oleh para tengkulak (pengepul), mereka sengaja membeli gabah dari petani dengan harga murah lalu menimbunnya, ketika harga beras mahal baru mereka jual ke pasaran,” geram Sungkono.

Disisi lain politisi asal Dapil Jawa Timur



Anggota Komisi XI DPR Sungkono

ini juga menyoroti kinerja Perum Bulog dalam menyerap gabah hasil panen raya para petani khususnya di Daerah

Jawa Timur. “Saya ingin mengetahui apa saja yang dilakukan Bulog melihat fenomena semacam itu, dimana ada disparitas harga gabah dan beras yang cukup tinggi di tingkat petani, ini kan tidak adil,” ujar sungkono.

Persoalan lain yang tak luput dari perhatian politisi yang selalu memakai kopiah ini adalah langkanya pupuk terutama pupuk bersubsidi. Ia merasakan langsung langkanya pupuk produksi dalam negeri dengan harga yang terjangkau, walaupun ada biasanya harganya tak menentu. “Saya terpaksa membeli pupuk produksi Jerman dengan harga 6 kali lipat lebih mahal untuk menyelamatkan usaha perkebunan saya, jika tidak maka akan merusak produktifitas tanaman dalam jangka

panjang,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Perry Warjiyo, Deputy Gubernur BI mengatakan bahwa jajaran Bank Indonesia (BI) akan selalu berkoordinasi dengan TPID untuk mengantisipasi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terutama terkait *Administrative Price*. “Utamanya menjelang lebaran kami (TPID) akan bergerak untuk mengendalikan harga,” jelasnya.

Sementara, Perwakilan Bulog Jatim dan Dinas Pertanian Pemprov Jatim berjanji akan bekerja lebih maksimal untuk menyerap produksi gabah dari para petani serta memperbaiki sistem distribusi pupuk, terutama pupuk bersubsidi bagi para petani. (odji) foto: naefuroji/parle/hr

Adang Sudrajat Gantikan Ma'mur Hasanuddin

Rapat Paripurna DPR RI menetapkan satu orang anggota Dewan Pengganti Antar Waktu (PAW) dari PKS dr. Adang Sudrajat menggantikan Ma'mur Hasanudin. Rapat paripurna kali ini mengagendakan penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2004, namun didahului pelantikan Anggota Pengganti Antar waktu DPR RI.

Adang Sudrajat merupakan salah satu tokoh Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Bandung, sebelum melangkah ke DPR RI, dirinya pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Kabupaten Bandung periode 1998-1999. Selain itu pada tahun 2001-2005, Adang menjabat sebagai Ketua Bidang Kebijakan Publik DPW PKS. hingga dirinya dipercaya menjadi Bendahara Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera periode 2005-2010. sekarang ini dirinya menjabat sebagai Ketua Bidang generasi muda dan profesi DPW Partai Sejahtera sejak tahun 2010 hingga saat ini.

Sebagai salah seorang dokter sekaligus politisi, dia pernah menjabat sebagai salah satu anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKS Periode 2004-2009. Didalam dunia kedokteran Adang Sudrajat pernah menjabat sebagai Wakil Direktur SDM RS Al Islam Bandung dari tahun 1997-2000. terakhir dirinya pernah menjabat Wakil Direktur Penunjang Medik RS Al Islam Bandung tahun 2000-2001

Selain dunia kedokteran, dirinya juga mencintai dunia pendidikan, bahkan dia sempat menjabat sebagai Direktur Bidang Akademik Akmaper Al Islam Bandung tahun 2001 sampai 2004. Adang sebagai putra Ciamis menghabiskan masa kecilnya di Ciamis, Pria lulusan SD Janggala 5 Ciamis tahun 1975, ini kemudian melanjutkan sekolahnya di SMPN 1 Tasikmalaya hingga lulus tahun 1978. Kemudian dirinya bersekolah di SMA 1 Ciamis tahun 1981. Pria lulusan Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung ini juga telah menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya pada jurusan Manajemen STMB Telkom Bandung.



Anggota PAW dari F-PKS Adang Sudrajat saat pengambilan sumpah

Sesuai pelantikan Ketua DPR RI Setya Novanto mengucapkan selamat atas dilantikannya anggota DPR RI Adang Sudrajat. “Selamat atas pelantikannya semoga dapat lebih memperkuat tugas konstitusional dewan,” ujarnya kepada anggota DPR PAW Adang Sudrajat. (Si) Foto: iwan armanias/parle/iw

Kelangkaan Sembako Permainan Spekulasi



Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo

Memasuki bulan Ramadhan, fenomena tahunan meningkatnya permintaan akan komoditas pangan yang berujung pada kenaikan harga sembako kembali terjadi di tanah air. Bahkan terjadi kelangkaan akibat aksi spekulasi, adanya penimbunan bahan pangan, dan terkendalanya distribusi pasokan yang lambat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono berpendapat bahwa harus dilakukan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian terkait kelangkaan tersebut, jangan sampai kelangkaan sembako hanya dibebankan pada Kementerian Perdagangan.

“Saya kurang yakin bahwa terjadi kelangkaan sembako di Indonesia, padahal puasa kan masih lama, saya melihat permintaan masyarakat akan sembako masih belum meningkat tinggi dibandingkan permintaan saat puasa nanti,” ungkap Bambang Haryo di Jakarta, Rabu (3/6)

Politisi Gerindra ini juga berpendapat bahwa, “belum puasa saja sudah terjadi kelangkaan sembako, tentu ini ada spekulasi yang menginginkan untuk mencari keuntungan di saat-saat permintaan sembako meningkat terutama di saat puasa dan lebaran”.

“Karena itu langkah cepat yang harus dilakukan Kementerian Perdagangan dengan melakukan operasi pasar dan menyelidiki atas kelangkaan tersebut. Operasi pasar diharapkan dapat menstabilkan dan menekan harga-harga sembako di pasar,” ungkap Bambang Haryo.

Sejauh ini, kenaikan dan kelangkaan sembako belum terjadi di seluruh wilayah Indonesia, namun dalam hal ini pemerintah perlu melakukan antisipasi agar tidak menimbulkan keresahan dan memberatkan masyarakat. Selain itu Komisi VI juga berencana memanggil Menteri Perdagangan terkait dengan permintaan bahan pangan yang tinggi pada bulan puasa dan lebaran. (skr)/
foto:iwan armanias/parle/iw.

DPR Dukung Target 2,5 juta Wisman Kunjungi Great Batam

Kawasan Great Batam yang meliputi Kepulauan Riau dan sekitarnya telah menjadi gerbang bagi sekitar dua juta turis mancanegara mengunjungi Indonesia pada 2014. Dalam kaitan ini, Ketua Komisi X DPR yang juga Ketua Tim Kunker Spesifik ke Kepri Teuku Riefky Harsya mendukung program pemerintah menargetkan kunjungan turis wisman ke Kawasan Great Batam mencapai 2,5 juta pada 2015.

Hal itu disampaikan Teuku Riefky saat memimpin Tim Kunker Komisi X ke Batam, Kepri, Rabu (3/6). Pada 2014, wilayah Great Bali, Great Jakarta dan Great Batam menjadi tiga kawasan tujuan utama pariwisata dengan menyumbang sekitar 90 persen jumlah kedatangan turis wisman ke Indonesia.

Sementara pada 2014, lanjut Riefky, Indonesia hanya mencatatkan angka kunjungan wisman sebesar 9.435.411 atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 8.802.129 wisman.

Untuk itu dia berharap, perbaikan infrastruktur akan mendongkrak daya saing pariwisata Indonesia di tataran



Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya

global yang saat ini berada di peringkat 70 ke peringkat 30 dunia pada 2019 nanti.

Letak geografis Kepulauan Riau termasuk Batam yang mempunyai tempat destinasi wisata alam yang cukup banyak. Apalagi wilayah ini berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia memungkinkan wisatawan mancanegara (wisman) untuk melancong ke Batam cukup tinggi.

Secara geografis provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810,71 kilometer persegi dengan 95 persennya perairan dan 5 persen daratan. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis dan secara keseluruhan wilayah Riau terdiri dari empat kabupaten dan dua kota, 47 kecamatan serta 274 kelurahan atau desa

dengan jumlah pulau besar sebanyak 2.408.

Dalam Kunker ini Tim Komisi X DPR RI juga menyempatkan meninjau objek wisata destinasi Nongsa tempat yang pertama dikunjungi Kinema Studio dan berbagai hotel dan resort mewah di pulau Batam sebagai fasilitas pendukung pariwisata Batam,

Tim Kunker Komisi X DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau berjumlah 12 orang dipimpin Ketua Komisi X Riefky Harsya didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR F-Gerindra H. Nuroji, Junico BP Siahaan, Zulfadhli, Mujib Rohmat, Sutan Adil Hendra, Edhie Baskoro Yudhoyono, Eko Hendro Purnomo, Dedi Wahidi, Krisna Mukti, Elviana dan Dadang Rusdiana. (Andri) foto: andri/parle/hr

Daerah Diminta Miliki Arsitek Yang Utamakan Ornamen Setempat



Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR Lasarus berdialog dengan Gubernur Kalteng

Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR Lasarus mengemukakan, Rancangan Undang-Undang tentang Arsitek belum berhasil disahkan menjadi Undang-undang, padahal proses penggodokan sudah berlangsung lama. Karena itu Komisi V DPR bertekad segera menyelesaikan RUU ini dalam rangka melindungi arsitek Indonesia.

“Jangan sampai Arsitek yang asli Indonesia umumnya serta Kalimantan Tengah khususnya tidak terlindungi karya-karyanya. Kita berharap semua

daerah memiliki arsitek yang lebih mengutamakan ornamen kedaerahannya sebagai jati diri masing-masing daerah,” tegas Lasarus dihadapan Gubernur Kalteng dan Civitas Akademika Palangkaraya di Aula Eka Hapakat lantai 3 kantor Gubernur baru-baru ini.

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Lasarus didampingi 7 orang anggota Dewan melakukan kunjungan kerja ke Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah Focus Group Discussion (FGD) terkait

dengan Undang-Undang Arsitek.

Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam sambutannya saat menerima Tim Komisi V DPR mengakui, bahwa penggodokan Rancangan Undang-Undang Arsitek sudah dilakukan sewaktu dirinya masih menjabat Ketua Komisi II DPR namun hingga sekarang belum diselesaikan. Untuk itu dia berharap dengan adanya Focus Group Discussion (FGD) ini maka RUU Arsitek dapat segera disahkan.

“Harapan kita RUU tersebut dapat disahkan dan Kalimantan Tengah siap memberikan masukan, terutama arsitek lebih mengedepankan ornamen daerah,” kata Teras.

Kepala Dinas PU Provinsi dan Kab/Kota Palangkaraya memastikan bahwa bangunan-bangunan di wilayah Kalteng sudah menggunakan ornamen-ornamen khas Kalteng, yaitu Dayak. “Kita mendukung pembahasan RUU Arsitek, namun harus memperhatikan tiga hal yaitu, agar sejalan dengan RUU Jasa Konstruksi, kemudian ada penjenjangan arsitek dan mengakomodir kearifan lokal yang menjadi ciri khas budaya daerah masing-masing,” jelas Leonard Samuel Ampung Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalteng. (hr), foto : eka hindra/parle/hr.

DPR Minta BPK Audit KPU

DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun audit itu dilakukan atas dasar tiga poin yakni audit kinerja, audit keuangan dan investigasi. Pasalnya, anggaran penyelenggaraan pilkada 2015 yang semula berjumlah Rp 3 miliar, membengkak menjadi Rp 7 miliar.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai melaksanakan pertemuan dengan BPK di ruang rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Jumat (29/05/15). Dalam kesempatan itu, hadir pula Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Pimpinan Komisi II dan III DPR.

“Pimpinan meneruskan permintaan dari Pimpinan Komisi II, untuk dilaksanakan audit kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pimpinan DPR tidak dalam kapasitas menyetujui

atau tidak, tapi lebih ke meneruskan kepada BPK. Ini sudah disetujui oleh seluruh Poksi di Komisi II,” kata Taufik.

Politisi F-PAN ini menambahkan, audit ini juga merupakan keinginan publik, agar pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015 ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

“Tidak ada maksud politik dalam audit ini. Hasil auditnya, akan Pimpinan DPR sampaikan kepada Komisi. Nanti juga BPK akan menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan tiap semester secara lengkap,” tambah Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna menyatakan bahwa pihaknya dapat segera melakukan audit. Namun, sebelum memastikan apakah audit akan dilakukan atau tidak, BPK harus membawa hasil pertemuan ke rapat internal terlebih dahulu. Ini dilakukan karena BPK tidak bisa melakukan audit sembarangan meski ada permintaan.

“Apabila hasil sidang badan kami memutuskan dapat dilaksanakan audit, dan biasanya tak ada penolakan terhadap permintaan DPR ke BPK, maka kita akan melaksanakan audit tersebut,” kata Agung.

Namun, Agung tak bersedia memastikan kapan sidang BPK akan dilakukan terkait permintaan DPR tersebut. Ia hanya memastikan bila audit dilakukan itu tidak akan mengganggu proses Pilkada serentak.

“Hasil audit itu pertama temuan, kedua kesimpulan, ketiga rekomendasi. Nanti kami serahkan kepada DPR dan DPR yang tindaklanjuti sesuai aturan perundangan,” imbuh Agung. (sf) foto: denus/parle/hr

Anggota DPR Eldie Suwandie Meninggal Dunia

Inna Lillahi Wailaihi Rooji'yun

Telah meninggal dunia anggota DPR Drs. H. Eldie Suwandie Rabu (3/6) pukul 05.20 di Rumah Sakit Santo Boromeus, Bandung. Almarhum saat ini sudah berada di Rumah duka Jl Pangeran Suriatmadja 42 Sumedang. Jenazah almarhum akan disolatkan di Masjid Agung Sumedang dan seusai solat dluhur dimakamkan di pemakaman keluarga Desa Jatimekar, Kecamatan Situraja, Sumedang, Jawa Barat.

Eldie Suwandie lahir pada 22 Februari 1945 terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Barat, terakhir duduk di Komisi V DPR (bidang perhubungan dan PU). Meniti karier sebagai anggota DPR selama empat periode mulai periode 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014 dan pada pemilu 2014 yang lalu terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2014-2019.

Sebelumnya, lulusan Fisip Unpad ini menjadi anggota MPR pada tahun 1982-1987 dan 1997 – 1999. Pada saat yang sama almarhum juga menjadi anggota DPRD Jawa Barat selaku Ketua Harian Panitia Anggaran.

Almarhum juga aktif berorganisasi diantaranya menjabat



Almarhum Anggota Komisi V DPR Eldie Suwandie

anggota Dewan Paripurna Daerah PPM Jawa Barat, anggota Dewan Pertimbangan Pusat MKGR, Wakil Ketua MKGR Provinsi Jawa Barat, Wakil Sekretaris DPD Golkar Provinsi Jawa Barat dan Wakil Sekretaris DPD KNPI Provinsi Jawa Barat. Almarhum meninggalkan seorang isteri Dinnar dan tiga orang putera. (mp) foto: rizka/parle/hr

Komisi VIII Pertanyakan Mangkirnya Dirjen Pendis RDP Dengan DPR



Suasana Rapat Komisi VIII DPR dengan Dirjen Pendis

Setelah dua kali mangkir dari undangan Komisi VIII DPR RI, Rabu (3/6) Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama akhirnya hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kontan hal itu mengundang pertanyaan dari hampir seluruh anggota Komisi VIII yang hadir di ruangan itu.

“Saya heran dua kali diundang rapat tidak hadir dengan alasan sedang di luar negeri, di panggilan ketiga ini datang tapi tanpa ada permohonan maaf sama sekali. Apakah kepergian Pak Dirjen ke luar negeri itu lebih penting dibanding rapat ini,” tanya anggota Komisi VIII DPR RI, Choirul Muna.

Ditambahkan anggota Komisi VIII lainnya, Khotibul Umam

Wiranu, jika kemudian Dirjen Pendis itu beralasan ada acara kedinasan, maka acara kedinasan apa yang dimaksud? Bukankah ada Duta Besar sebagai wakil pemerintah atau negara untuk berbagai kepentingan di negara lain. Hal itu sejatinya harus dimaksimalkan, sehingga akan mengurangi anggaran negara di dalamnya.

Pada kesempatan itu Dirjen Pendis, Kamaruddin Amin sempat mengatakan bahwa keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penandatanganan MoU dengan berbagai pihak, termasuk kampus yang ikut bekerjasama memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan pengajar di lingkungan Ditjen Agama Islam.

Terkait pemberian beasiswa tersebut, Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay berharap Kementerian Agama untuk menertibkan para penerima beasiswa luar negeri yang tidak ingin kembali mengajar di tanah air, melainkan lebih memilih mengajar di luar negeri.

“Kalau memang penerima beasiswa ke luar negeri di lingkungan Ditjen Pendis Kemenag ada yang tidak ingin kembali ke tanah air untuk mengajar, maka putus saja statusnya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Karena mereka disekolahkan di luar negeri atas biaya negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Jika memang itu tidak bisa dilakukan ya sudah cabut saja statusnya dan stop gajinya,” tegas Saleh yang diamini sebagian besar anggota Komisi VIII lainnya. (Ayu) foto: iwan armanias/parle/hr

DPR Dorong Segera Bentuk KPAI Daerah



Anggota Komisi VIII DPR Dwi Astuti Wulandari berdialog dengan anak-anak PAUD

Dewan Perwakilan Rakyat mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar segera membentuk KPAI Daerah. Pasalnya, dengan tidak

adanya KPAI Daerah, koordinasi dan komunikasi antara daerah dengan pusat menjadi terhambat.

Demikian disampaikan Anggota

Komisi VIII DPR Anda, saat Kunjungan Spesifik Komisi VIII dalam rangka meninjau Kota Layak Anak di Gorontalo, beberapa waktu yang lalu. Tim Kunspek dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fathan.

“Di pusat sudah ada KPAI Pusat, tapi di daerah belum ada. Efeknya, koordinasi antara daerah dengan pusat ini seakan-akan buntu. Mungkin ini menjadi salah satu jalan untuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berkoordinasi dan segera membentuk KPAI Daerah,” tegas Anda.

Politisi F-Gerindra ini menambahkan, daerah menjadi basis dari pusat. Sehingga, selama ini tidak terjalin komunikasi antara pusat dan daerah. Hal ini dapat merugikan masyarakat, karena tidak dapat melapor kejadian kekerasan yang menimpa perempuan atau anak.

“Jika nanti ada di KPAI Daerah di setiap Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia, ini memudahkan koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat. Perlu sosialisasi juga kepada masyarakat, jika ada yang melihat kekerasan

kepada anak dan perempuan, atau anak terlantar, segera melapor kepada KPAI Daerah, sehingga nanti dapat dibina,” tambah Politisi asal Dapil Banten I ini.

Anda menegaskan, bahwa pembentukan KPAI Daerah merupakan amanat Undang-undang, sehingga harus segera dibentuk. KPAI Daerah ini nantinya bisa difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan KPAI Pusat.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR Dwi Astuti Wulandari menyayangkan

belum adanya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di dua kabupaten di Provinsi Gorontalo. Kalaupun ada, sarana prasarananya minim.

“Di sini memang ada P2TP2A, tapi kecil. Ketika saya tanya apakah masyarakat sudah tahu pengaduannya di sini, petugasnya menyatakan masyarakat sudah tahu. Mereka juga sudah mengadakan sosialisasi atau penyuluhan sampai ke kecamatan-kecamatan,” imbuh Politisi Fraksi Demokrat ini.

Namun, Politisi asal Dapil Jakarta I

mengingatkan, penyuluhan dan sosialisasi terkait pengaduan kekerasan agar ditambah, sehingga masyarakat menjadi tahu lokasi pengaduan jika ada yang mengalami kekerasan, baik kepada anak ataupun perempuan.

“Yang saya tahu dan temui di daerah, dimanapun juga, banyak masyarakat yang belum mengetahui kemana akan mengadu. Ini masih agak bias dan tabu, apakah melapornya ke P2TP2A atau kantor polisi,” tambah Politisi yang akrab disapa Ade ini. (sf) foto: sofyhan/parle/hr

Tuntaskan RUU Kebudayaan, Komisi X Dengar Pemprov DIY



Tim Kunspek Komisi X DPR foto bersama Sekda DIY

Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menyerap aspirasi dari segenap stakeholder kebudayaan di daerah ini. Seluruh masukan yang diperoleh akan menjadi input bagi penuntasan RUU Kebudayaan yang saat ini sedang dibahas oleh komisi yang membidangi masalah pendidikan dan kebudayaan ini.

“Kami ingin mendengar berbagai capaian, masalah, kendala berbagai program pengembangan kebudayaan

di Provinsi D.I. Yogyakarta, termasuk masukan terhadap RUU Kebudayaan yang sedang disusun oleh Komisi X DPR RI,” kata Ketua Tim Kunspek Ridwan Hisyam dalam pertemuan dengan jajaran Pemprov DIY di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (3/6).

Ia menambahkan sebenarnya RUU ini sudah pernah disusun oleh DPR Periode 2009-2014, namun karena sejumlah alasan sampai masa bakti berakhir produk legislasi yang merupakan usul inisiatif DPR ini belum tun-

tas. Wakil Ketua Komisi X ini berharap dalam periode ini RUU Kebudayaan dapat diselesaikan.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyebut Yogya dengan keistimewaannya dalam APBN 2015 memiliki anggaran pengembangan kebudayaan cukup besar yaitu Rp420.800.000.000. Keberhasilan dalam pembangunan kebudayaan membuat banyak daerah menjadikan provinsi ini sebagai rujukan.

Ridwan dalam kunjungan ini didampingi sejumlah anggota Komisi X diantaranya Sohibul Iman (FPKS), Asdy Narang (FPDIP), Ida Bagus Putu Sukarta (FP Gerindra), Yayuk Basuki (FPAN) dan Kresna Dewanata Phrosakh (FP Nasdem).

Dalam penjelasannya Sekda Provinsi DIY Ichsanuri menjelaskan Perda No.5/2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya menjadi salah satu panduan utama. Itu artinya pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasarkan nilai luhur budaya.

Sekda yang juga didampingi Kadis Kebudayaan Umar Priyono dan jajaran juga menyebut upaya mengembangkan desa budaya yang saat ini telah mencapai 32 desa. Pada saatnya nanti separuh dari 438 desa di provinsi ini ditargetkan berkembang menjadi desa budaya. (iky) foto: ibnur khalid/parle/hr



Pelantikan Anggota Dewan Pengganti Antar Waktu (PAW) Adang Sudrajat menggantikan Ma'mur Hasanudin, Kamis (04/06) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI meninjau Taman Belajar dan Bermain Anak Menara Ilmu di Kabupaten Limboto, Provinsi Gorontalo, Jumat (22/05). Foto: Sofyan/Parle/HR



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi memimpin Raker Komisi IX dengan Menkes tentang anggaran, Kamis (04/06) Foto: Naefuroji/Parle/HR